

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGAMBILAN BIAYA
KERUGIAN ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PADA PERSEWAAN
ALAT PESTA**

**(Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom,
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)**



Oleh
MUTIARA FIKY UTAMI
NPM : 1421030235

Program Studi Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Tahun 2018**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGAMBILAN BIAYA
KERUGIAN ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PADA PERSEWAAN ALAT
PESTA**

**(Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom,
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

MUTIARA FIKY UTAMI

NPM : 1421030235

Program Studi Muamalah

Pembimbing I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Pembimbing II : Khoirudin, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Tahun 2018**

ABSTRAK

Salah satu kegiatan mua'malah adalah sewa-menyewa. Sewa menyewa merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam sewa menyewa harus sesuai dengan syari'at Islam, baik dari segi syarat ataupun rukunnya. Sewa menyewa yang tidak memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa akan berakibat tidak sahnya sewa menyewa yang dilakukan. Praktik persewaan alat-alat pesta pada persewaan alat pesta Dwi Wijayanti terdapat suatu perjanjian sewa dalam klausula perjanjian tersebut memuat tentang pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penyewa. Pembatalan sepihak yang dimaksud adalah tindakan mengakhiri suatu perjanjian sewa-menyewa barang pada persewaan alat-alat pesta yang telah disepakati. Pembatalannya ada yang dilakukan sebelum dilaksanakannya pengiriman barang sewa atau sesudah selesai pelaksanaan pengiriman barang sewa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak dan untuk mengetahui bagaimana pandangan secara hukum Islam tentang pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data ini dihimpun melalui wawancara dengan pihak pemilik persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti dan pihak penyewa peralatan pesta Dwi Wijayanti. Selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni memaparkan keadaan objek penelitian sebagaimana keadaan sebenarnya kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam. Setelah itu diambil kesimpulan dengan pola pikir deduktif, yakni yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik sewa menyewa pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti dalam pelaksanaan sewa menyewa pada dasarnya adalah mubah, karena akad perjanjian sewa menyewa yang dilakukan kedua belah pihak telah menunjukkan kerelaan dan adanya kesepakatan. Akan tetapi menurut hukum Islam adalah haram dikarenakan pengambilan biaya atas pembatalan sepihak yang dilakukan penyewa. Hal tersebut dapat diketahui pada pembebanan biaya atas pembatalan sewa dengan ganti rugi 50% dari nilai sewa yang dibatalkan, jika pembatalan sebelum barang sewa telah dikirim kepada penyewa. Namun jika barang sewa telah dikirim oleh pihak pemilik persewaan peralatan pesta maka pihak penyewa diharuskan membayar biaya kerugian 75% dari nilai sewa yang dibatalkan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

Nama : Mutiara Fiky Utami

NPM : 1421030235

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGAMBILAN BIAYA KERUGIAN ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PADA PERSEWAAN ALAT PESTA** (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M. H.
NIP.197111061998032005

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I
NIP.1978072520091002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M. H
NIP.197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGAMBILAN BIAYA KERUGIAN ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PADA PERSEWAAN ALAT PESTA** (Studi Kaua Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwin Wijayanti Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan) disusun oleh Mutiara Fiky Utami NPM 1421030235 Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal: Rabu / 14 Februari 2018.

TIM PENGUJI

Ketua : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H (.....)

Sekretaris : Muslim, M.H.I (.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Penguji II : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H (.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag

NIP. 07609011997031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah :

2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan), hlm.107

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Tiada kata lain yang terucap kepada-Mu ya Rabbi, selain kata syukur dan terimakasih atas rahmat-Mu, karunia dan kesempatan yang telah engkau berikan kepadaku untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai. Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Slamet Priyadi dan Ibu Wartimah tercinta yang telah mengasuh, membesarkanku, mendidik, mengarahkan, memotivasi, membimbing dan senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Walaupun jauh dimata, namun lantunan do'anya mampu kurasakan, semoga Allah SWT, selalu melimpahkan Rahmat dan Maghfiroh kepada keduanya, Amin..
2. Almamaterku tercinta, UIN Raden Intan Lampung.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

RIWAYAT HIDUP

Mutiara Fiky Utami, dilahirkan di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 03 Juli 1996, Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Slamet Priyadi dan Ibu Wartimah.

Riwayat pendidikan sebagai berikut :

1. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SDN Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2008,
2. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Sidoharjo tamat pada tahun 2011
3. Melanjutkan pendidikan selanjutnya dijalani di MAN Kalianda dan tamat pada tahun 2014
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dan mengambil Jurusan Muamalah.

Bandar Lampung, 2018

Mutiara Fiky Utami
Npm. 1421030235

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang dan langit yang dijadikannya penerang, dan bulan yang bercahaya. Jika bukan karena rahmat dan karunia-Nya, maka tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW lah yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya selangit namun karyanya nyata membumi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang bersifat moral, material, maupun spiritual, secara

langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikapus hijau tercinta ini, khususnya di Fakultas Syari'ah.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. H. A Khumeidi Ja'far, S.Ag., MH. Selaku Ketua Jurusan dan Khoiruddin, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan, yang telah memberikan pelayanannya kepada penulis dengan ikhlas selama study.
4. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I di tengah kesibukan, beliau telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Khoiruddin, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terwujud karya ilmiah sebagaimana yang diharapkan.
6. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Desa Agom Bapak Maryono dan Ibu Dwi Wiyanti selaku pemilik persewaan Alat-alat pesta yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan selama peneliti melakukan penelitian.
8. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
9. Almamater Kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga atas motivasi dan do'a dari semua pihak baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum, menjadi catatan ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga jerih payah dan amal Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta teman-teman mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 2018
Penulis

Mutiara Fiky Utami
NPM. 1421030235

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	ii
COVER DALAM.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	19
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	20
4. Keabsahan Perjanjian.....	21
5. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	24
6. Ketentuan Tentang Perjanjian.....	28
7. Prosedur Perjanjian.....	29
8. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak.....	29
B. Sewa-Menyewa Menurut Hukum Islam.....	30
1. Pengertian sewa-menyewa.....	31
2. Dasar Hukum sewa-menyewa.....	32
3. Rukun dan Syarat sewa-menyewa.....	34
4. Hak dan Kewajiban Penyewa dan Yang Menyewakan.....	37
5. Batal atau Berakhirnya sewa-menyewa.....	38
6. Pengembalian Sewa.....	39
7. Udzur Yang Dapat Merusak Akad Ijarah.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi.....	47
1. Pengertian Ganti Rugi.....	47
2. Dasar Hukum Ganti Rugi.....	48
3. Syarat Sah Ganti Rugi.....	49

4. Pendapat Ulama mengenai Ganti Rugi.....	50
5. Fatwa DSN MUI tentang Ganti Rugi	52

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti.....	54
B. Praktik Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti.....	60
C. Praktik Pembatalan Sepihak dan Pengambilan Biaya Kerugian.....	63

BAB IV ANALISA DATA

A. Analisin Praktik Pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat pesta Dwi Wijayanti.....	66
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom Kec.Kalianda Kab. Lampung Selatan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Interview
2. Lampiran Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau kerangka, maka penulis merasa perlu menjelaskan kata-kata yang terdapat didalam skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom Kec.Kalianda Kab. Lampung Selatan”**

Untuk mengetahui pokok bahasan yang terkandung dalam judul ini, maka yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan perbuatan, dsb untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab –musabah, duduk perkaranya,dsb). Menguraikan suatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri

disertai hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Ahmad Rofiq adalah “peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupannya”.³ Sedangkan menurut Ismail Muhammad Syah “Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakuidan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.”⁴ Maksud hukum Islam disini adalah fiqh muamalah.

3. Pengambilan Biaya Kerugian

Yaitu suatu bentuk pengambilan biaya kerugian pada persewaan yang disebabkan salah satu pihak telak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa yang telah disepakati. Dalam hal ini pihak pemilik persewaan mengalami kerugian atas pembatalan pemesanan. Sehingga pihak persewa mengambil biaya kerugian kepada penyewa.⁵

4. Pembatalan Sepihak

Pembatalan sepihak dapat diartikan sebagai ketidakediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 58

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 4

⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 17

⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Op.Cit.*, hlm. 202

mengakhiri perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian yang telah disepakati suatu penyewa dan pemilik persewaan.⁶

5. Sewa

Sewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.⁷

6. Alat-Alat Pesta

Alat pesta adalah perabotan atau perkakas untuk digunakan dalam acara atau event.⁸

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah menganalisis pandangan hukum Islam yaitu fiqh muamalah tentang pengambilan biaya yang dilakukan oleh persewaan atas pembatalan yang dilakukan sepihak oleh penyewa dalam sewa menyewa alat pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu masalah praktik muamalah yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Terbatasnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang ketentuan-ketentuan pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada hal

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit., hlm.165

⁷ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5

⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit., hlm.120

sewa-menyewa khususnya yang terjadi dalam sewa menyewa alat pesta Dwi Wijayanti.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang di pelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Adanya literatur yang menunjang untuk membahas masalah yang penulis teliti, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati Muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhawi. Sedangkan menurut Yusuf Musa, Fiqh Muamalah adalah peraturan-peraturan untuk menjaga kepentingan umum.⁹

Kegiatan muamalah tidak terlepas dari perjanjian/pertalian yang dinamakan akad. Akad dalam terminology artinya perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁰ Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan,

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 46

sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹¹ Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa setiap ‘aqdi (persetujuan) mencakup tiga tahap yaitu perjanjian, persetujuan kedua belah pihak, dan perikatan.

Allah SWT telah memberikan kemudahan yang salah satunya adalah kebebasan dalam bermuamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, Islam juga merupakan ajaran yang universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan dan mengajarkan manusia agar selalu berhubungan baik dan bertransaksi antara satu dan lainnya.¹²

Bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Alquran dan hadist Nabi.¹³

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan sewa-menyewa (al-ijarah) itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.¹⁴

Islam hanya memberi aturan usaha secara garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sebab hal tersebut merupakan

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 65

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Penerjemah : Asep Sobari, dkk, (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 589.

¹³ *Ibid.*, hlm. 590

¹⁴ Abdul Rahman Gazaly, Ghufron Ihsan Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 277-278.

salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian dalam mengadakan perjanjian ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila dalam perjanjian secara hukum Islam terdapat suatu pembatalan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Maka dari pembatalan sepihak tersebut dapat dikenakan biaya ganti rugi secara hukum Islam yang ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta'wid).¹⁵ Bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (ta'wid) untuk dijadikan pedoman. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Surat yang lain berbicara tentang janji agar ditepati dengan sungguh-sungguh terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 sebagai berikut

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “.....Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta'wid).

Jika perjanjian ada yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung (setelah dibuatkan perjanjian secara tertulis), sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian (sebelum dibuatkan perjanjian secara tertulis), maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Dari pelaksanaan praktik persewaan alat-alat pesta pada Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti terdapat suatu perjanjian sewa dalam klausula perjanjian tersebut memuat tentang pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penyewa. Pembatalan sepihak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan mengakhiri suatu perjanjian sewa-menyewa barang pada persewaan alat-alat pesta yang telah disepakati. Pembatalannya ada yang dilakukan sebelum dilaksanakannya pengiriman barang sewa atau sesudah selesai pelaksanaan pengiriman barang sewa.

Dilihat dari segi perjanjian tersebut, klausula yang dibuat secara sepihak oleh pemilik persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti dinilai merugikan bagi penyewa. Karena di setiap pembatalan pemesanan barang-barang sewa selalu ada pengambilan biaya kerugian yang dicantumkan pada bon pesanan Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Pada praktik persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti mengenai aturan tentang pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sewa hanya dijelaskan dalam bon pesanan, sedangkan dalam brosur yang dimiliki persewaan alat-alat

pesta Dwi Wijayanti tidak dijelaskan apabila ada pembatalan sewa akan dikenakan biaya kerugian.¹⁶

Aturan-aturan atas pembatalan sewa ini belum jelas karena penyewa hanya akan mengetahui ada pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sewa, bilamana sudah melakukan pesanan lalu ditulis pada bon pesanan selanjutnya penyewa diberikan bon atas pesannya. Jadi apabila ada pembatalan sewa pada hari itu juga akan tetap dikenakan biaya kerugian, meskipun ada alasan terhadap pembatalan tersebut akan tetapi pihak persewaan tidak mau tau karena dinilai telah melakukan pembatalan sepihak maka aturannya apabila ada pembatalan dikenakan biaya kerugian.

Persoalan-persoalan yang telah dipaparkan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut pandangan hukum Islam mengenai praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat pesta Dwi Wijayanti. Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Dwi

¹⁶ Wawancara dengan bapak Suyatno, 11 Novembe 2017, pukul 17.00 WIB di Rumah.

Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak dalam penyewaan alat pesta.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya dan menjadi pertimbangan dalam menentukan pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat pesta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹⁷ Dalam hal ini penelitian dilakukan pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijanti Desa Agom, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁸ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat pesta. Pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti Desa Agom Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan ditinjau dari pandangan hukum Islam kemudian dianalisis secara mendalam.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum ekonomi syari'ah yang terkait dengan pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat pesta. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara, observasi, dan atau sumber data

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 32.

¹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2009), hlm. 54.

primer lainnya.¹⁹ Dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti serta pihak penyewa yang melakukan pembatalan sepihak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dan subjek penelitiannya.²⁰ Peneliti ini menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat pesta.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama.²¹ Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun jumlah dalam populasi ini adalah 4 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik persewaan alat pesta dan 3 orang yang pernah dikenakan biaya atas pembatalan sepihak pada saat melakukan persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti.

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Dalam Teori dan Praktik), V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 87.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 1.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991) hlm. 102

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.²² Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 1 orang pemilik persewaan alat pesta dan 3 orang pihak yang menyewa peralatan alat pesta. Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 maka akan diambil semua sehingga peneliti ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.²³ Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, yaitu berjumlah 4 orang, maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi penelitian ini adalah penelitian populasi. Oleh karena itu, sampel dalam populasi ini berjumlah 4 orang.

5. Metode Pengumpulan Data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data, jika alat pengambil datanya cukup reliable (dapat dipercaya) dan valid, maka datanya akan cukup reliable (dapat dipercaya) dan valid pula. Untuk memperoleh data yang reliable (dapat dipercaya) dan valid penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²² *Ibid.*, hlm. 118

²³ *Ibid.*, hlm 120

a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sungguh canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat di observasi dengan jelas.

Pengumpulan data ini dimaksud agar penulis dapat melihat langsung bagaimana praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wiyanti.

b. Interview (wawancara)

Metode pengumpulan data dengan interview, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²⁴ Dalam hal ini pihak yang diwawancarai ialah pihak pemilik persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti dan pihak penyewa peralatan alat pesta Dwi Wijayanti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁵

Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan mengambil data dari

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), hlm. 136.

²⁵ M.Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

dokumen yang bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁶
- b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁷
- c. Sistematika Data, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁸

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).²⁹

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm. 243.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 245.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 246.

²⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996) hlm. 104.

a. Analisis deskriptif

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis melalui metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁰ Metode ini digunakan untuk mengetahui secara jelas praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

b. Pola pikir deduktif

Selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.³¹ Pola pikir ini berpijak pada teori-teori yang berhubungan dengan akad ijarah dalam hal sewa menyewa, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang pengambilan biaya kerugian pada persewaan alat-alat pesta pada Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

³⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 63.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian 2*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975, hlm. 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau Akad atau kontrak yang dapat diartikan sebagai “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.³²

Dalam al-Qur'an setidaknya dikenal ada dua macam istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata *al-aqda* (akad) dan *al-'ahdu* (janji).

Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti pembatalan perjanjian, terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْآتَنِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Q.s Al- Maidah: 1)

Sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian, yang terdapat dalam Q.S An-Nahl ayat 9 dan Q.S Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

³² Chairuman Pasaribu Suhrawati K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sjnarnv Grafika Offset,1996), hlm. 1

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠﴾

Artinya :

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”. (QS. An Nahl : 9)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”. (QS. AL Isra' : 34)

Menurut pendapat WJS. Poerwadarminta sebagai yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu pengertian perjanjian adalah “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh pihak atau lebih yang mana berjanji akan menanti apa yang tersebut dipersetujuan itu.”³³

Sedangkan perjanjian menurut subekti adalah “Peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”³⁴

Menurut Abdul Ghofur Anshori akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berpartisipasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas

³³ H. Chairuman Pasaribu Suhrawati K. Lubis, S.H, *Op. Cit.*, halm. 1.

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), Cet. Ke-19, hlm. 1.

prestasi tersebut, dengan atau melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.³⁵

Rahmat Syafe'i membagi definisi akad kepada definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan atas dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.³⁶

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 13 Undang-Undang dimaksud menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syari'ah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.³⁷

Menurut para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*), kata akad didefinisikan sebagai "Pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya."³⁸ Ulama Mazhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Tamiyah mengatakan yang dikutip oleh Wawan ,

³⁵ Abdul Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) Ed. Pertama, Cet. Ke-1, hlm. 22

³⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.43-44

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, hlm. 421

³⁸ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 45-46

akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktifitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.³⁹

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan qabul yang objeknya sesuai dengan syari'ah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhaan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Dengan demikian akad atau perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada suatu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Definisi akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Adapun mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Akad diwujudkan dalam ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendak untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah menerima artinya pihak kedua menerima atau menyetujui kehendak pihak pertama untuk melakukan akad. Ijab dan qabul

³⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 243

ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan

- 2) Akad sesuai dengan kehendak syariah, artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih, (baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan, dan tujuan) dianggap sah apabila sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam
- 3) Adanya objek hukum pada perikatan, yaitu terjadinya pemindahan pemikiran atau pengalihan kemanfaatan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul). Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.⁴⁰

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah :⁴¹

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syaria adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian merupakan perbuatan yang

⁴⁰ Gemala Dewi, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 48

⁴¹ H. Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 2-4

melawan hukum (hukum syaria'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2) Harus sama-sama ridha dan ada pilihan.

Maksud perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela tentang isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3) Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus teres terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

4. Keabsahan Perjanjian

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, dalam ajaran Islam untuk sahnya

suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsure yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsure yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :⁴²

a. Para pihak yang berakad (al-A'qidain)

Para pihak yang berjanji dua orang atau lebih yang melakukan akad adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak yang berjanji atau berakad dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad dan mempunyai kecakapan dalam tindakan hukum sehingga akad tersebut dianggap sah. Dalam istilah fiqh harus *mukallaf* dengan arti lain orang yang hendak melakukan perjanjian tersebut sudah dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang, dalam suatu akad, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahny suatu akad. Subjek perjanjian haruslah berakal sehat artinya tidak sedang mengalami gangguan jiwa, atau gila terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dialaminya.

⁴² Gemala Dewi, *Op.,Cit.*, hlm. 48

b. Objek Akad (*Ma'qud 'alaih*)

Objek akad atau perjanjian adalah sesuatu atau benda-benda yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.

c. Kesepakatan untuk mengikat diri (*Sighat al'aqd*)

Sighat al'aqd adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. Pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al'aqd*) menjadi sesuatu yang penting dalam rukun dan akad. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, jenis akad dan sasaran yang dikehendaki oleh para pihak. Bagi ulama Hanafiyah rukun akad sebenarnya hanya satu yaitu *sighat al'aqd* (*ijab dan qabul*) sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad dimasukkan kepada syarat-syarat akad, karena dalam pandangan ulama Hanafiyah yang dikatakan rukun adalah sesuatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada diluar esensi akad. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan (*offering*), sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (*acceptance*). Ijab dan qabul dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun tulisan. Sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai sighat hanya oleh mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Maka akad dalam bentuk perkataan adalah berupa sighat atau ucapan. Hal ini yang paling banyak digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak bisa mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

d. Tujuan Akad (*Mau'dhu'ul'Aqd*)

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Yang dimaksud dengan mau'dhu'ul'aqd adalah tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad. Dalam hukum positif yang menentukan tujuan ini adalah undang-undang itu sendiri, sedangkan dalam syariah Islam, yang menentukan tujuan akad adalah yang memberikan syara', yaitu Allah SWT. Menurut ulama fiqh, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syar' maka berakibat pada ketidakabsahan akibat hukum. Mengenai tujuan akad ini Ahmad Azhar Basyir yang dikutip oleh Gemala Dewi, mengemukakan bahwa tujuan suatu akad harus jelas dan dibenarkan oleh syara', serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, dan
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

5. Asas-asas Hukum Perjanjian

Para pihak harus memperhatikan asas-asas perjanjian dalam hal pembuatan perjanjian dimana asas-asas ini berpengaruh terhadap suatu akad. Apabila asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal

atau tidak sah akad/perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas itu yang harus diperhatikan dalam membuat akad/perjanjian adalah sebagai berikut :⁴³

a. Asas ilahiah

Asas ilahiah atau asas tauhid adalah asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk kegiatan muamalah, yakni perbuatan perjanjian. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.

b. Asas Kebebasan (*Al-Hururiyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian maupun menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa di kemudian hari. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Asas ini juga menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsure paksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legislasi perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

⁴³ Urutan dan Penjelasan asas-asas perjanjian ini diambil dari berbagai sumber. Lihat Abdul Ghofir Anshori, op.cit., hlm. 32-35, Gemala Dewi dkk, op.,cit, hlm. 30-37, Fathurrahman Djamil, op.cit., hlm 14-27, dan Dewi Nurul Musjtari, op.cit., hlm 47-50

c. Asas Persamaan atau Kesenjaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini mensyaratkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*) sering dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian.

d. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad/perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

e. Asas Kerelaan/Konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsure paksaan, tekanan dan penipuan.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Selain itu, jika terdapat

tidak ada kejujuran dalam perjanjian, maka akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsure penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

g. Asas kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad, sebab Islam memandang bahwa tidak semua objek dapat dijadikan objek akad. Dengan kata lain barang atau jasa atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (*halal*) dan baik (*thayyib*).

h. Asas tertulis (*Al-Kitabah*)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, serta suatu benda sebagai jaminan, karena dalam kepentingan pembuktian di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam QS Al-Baqarah Ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk tidak tunai/kredit. Disamping itu perlu adanya saksi-saksi (*syahaddah*), rahn (gadai untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

6. Ketentuan Tentang Pembatalan Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :⁴⁴

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batalnya perjanjian yang telah diadakan para pihak

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan

c. Jika ada kelancangan atau bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan secara kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 4-6

7. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara :⁴⁵

- a. Telah dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat dan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya
- b. Setelah berlalu waktu yang menandai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan. Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”, cara yang baik disini didefinisikan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk keputusan perjanjian secara total.

8. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena:⁴⁶

- a. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.
- b. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.

⁴⁵ Ibid., hlm. 6-7.

⁴⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1980), hlm. 36

- c. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian.

Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat subjektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim.⁴⁷

Jika pada waktu pembatalan ada kekurangan mengenai syarat subjektif, maka sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa perjanjian itu bukanlah batal demi hukum tetapi dapat diminta pembatalannya oleh salah satu pihak, pihak mana adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum.⁴⁸

B. Sewa-Menyewa Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, sewa menyewa (*Ijarah*) itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :

- 1) *Ijarah 'ain*, yakni *Ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.
- 2) *Ijarah amal*, yakni *Ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 38

⁴⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 58

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Ijarah 'ain (sewa menyewa untuk manfaat suatu barang)

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa dalam Islam dikenal dengan *al-ijarah* yang berarti balasan, tebusan atau pahala.⁴⁹ Menurut bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya adalah *iwad* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Sedangkan menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.⁵⁰

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.⁵¹

Secara terminologi ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fikih.⁵²

- a. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah, transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan

⁴⁹ Maftuh Ahnan, *Kamus Arab AL-Misbah*, (Jakarta: Galaxy, t.t), hlm.112

⁵⁰ Moh Saifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap, (Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahan)*, (Surabaya Terbit Terang), hlm. 377

⁵¹ Ibnu Abidin, Radd Al-Mukhtar Ala Dur Al Mukhtar, IV, 110 Dikutip dalam Rahmat Sya'fi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), hlm. 122

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 229

- b. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah, transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu
- c. Menurut Malikiyyah dan Hambali, *ijarah* adalah, pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, bahwa sewa menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan bayaran sebagai bayaran atas penggunaan manfaat atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah :233)”⁵³

⁵³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 33

2. Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Al Qashas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَغْرِهٖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS Al Qashas : 26-27)⁵⁴

3. Landasan Ijarah dalam Hadist :

Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anhu (ia berkata)

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ
بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًّا خَرِيتًا خَرِيتُ الْمَاهِرُ
بِالْهُدَايَةِ⁵⁵

Nabi Shallallahu'alaihi wasallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Ad-Da'il kemudian dari Bani 'Abdu bin A'bdi.

⁵⁴ Ibid, hlm. 246

⁵⁵ Shahih Al-Bukhuri, No. 2263

4. Ijma'

Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁵⁶

Dengan adanya dasar hukum sewa menyewa maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena dasar hukum merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar hukum diatas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu maka manusia yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

1. Rukun *Ijarah*

Para ulama berpendapat tentang rukun *ijarah* secara garis besar, perbedaan ulama itu sebagai berikut :⁵⁷

- a. Menurut ulama Hanafi rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa)
- b. Adapun golongan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali berpendirian bahwa rukun *ijarah* itu terdiri atas :
 - 1) *Mu'ajir* (pihak yang memberikan *ijarah* atau orang yang menyewakan)
 - 2) *Musta'jir* (orang yang membayar *ijarah* atau orang yang menyewa)
 - 3) *Al-Ma'qud alaih* (adanya objek ijarah)

⁵⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 124

⁵⁷ Helmi Karin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 34

Ma'qud alaih dijadikan rukun karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat, keadaanya, serta harganya.

4) *Ujrah* (upah atau imbalan)

5) *Sighat* (ijab dan qabul), serah terima antara kedua belah pihak

Menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sebagaimana dikutip dari terjemah fiqh empat mazhab, barang siapa yang menyewa sesuatu sewaan dengan cara yang tidak sah, dan ia terima barang sewaan, dan ia pun belum memanfaatkannya. Jika yang disewanya itu berupa tanah belum ditanami, dan belum bisa diambil kemanfaatannya sehingga masa penyewaannya telah habis, ia tetap wajib membayar uang sewanya seperti penyewa biasanya (secar sah). Demikian juga jika ia menyewarumah, lalu belum didiami, atau menyewa budak yang belum dimanfaatkannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, orang yang menyewakan tidak berhak atas uang sewaan karena barang tersebut belum bisa diambil manfaatnya.⁵⁸

2. Syarat *Ijarah*

a. Adanya kerelaan dari dua belah pihak.

Dalam hal ini, tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan dari pihak yang berakad atau pihak yang lain, sehingga penyelenggara akad *ijarah* didasarkan atas kemaua sendiri dengan penuh kerelaan.

⁵⁸ Al- alamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyi, *Terjemah Fiqih Empat Madzab*, (Bandung: Hasyim Perss, 2010), hlm.302

b. *Maq'ud alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *Maq'ud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *aqaid*. Diantara cara untuk mengetahui *alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan, jika ijarah itu pekerjaan atau jasa seseorang.

c. Objek *al-ijarah* sesuai yang dihalalkan oleh syara'para ulama fikih sepakat

bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat.

d. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini dilakukan menjelaskan pekerjaan yang diharamkan.

e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk sholat fardhu, puasa, haji, dan lain-lain. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa orang untuk melakukan sholat untuk diri penyewa dan menyewa orang belum haji untuk menggantikan haji penyewa tidaklah sah, karena sholat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

- f. Manfaat *maq'ud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah.
- g. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih ditangan orang lain, maka akad al-ijarah berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kerin, sehingga membawa mudarat bagi penyewa, maka pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.
- h. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan dilakukan atau kerelaan dan kejujuran.⁵⁹

4. Hak dan Kewajiban Penyewa Dan Yang Menyewakan Barang

- a. Hak penyewa barang
 - 1) Memanfaatkan barang yang disewa
 - 2) Mendapatkan jaminan akan barang yang disewa
 - 3) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewa
- b. Kewajiban penyewa barang

⁵⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 302.

- 1) Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa
 - 2) Memberikan bayaran atau uang sewaan terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan.
 - 3) Memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak (yang menyewakan dan yang menyewa)⁶⁰
- c. Hak yang menyewakan barang adalah menerima uang terhadap barang yang disewakan
- d. Kewajiban penyewa barang adalah melepaskan barang yang disewakan

5. Batal atau Berakhirnya Sewa Menyewa

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa adalah :

1. Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewanya disalah gunakan, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak yang menyewa

⁶⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: 2014), hlm. 181-182.

2. Rusaknya barang yang disewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah rumah, dan ternyata rumah itu terbakar habis, maka dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak penyewa.

3. Masa sewa menyewa telah habis

Maksudnya bahwa masa sewa menyewa yang telah diperjanjikan sebagaimana yang telah disepakati bersama telah habis, maka dengan sendirinya perjanjian swa menyewa telah berakhir (batal)

4. Adanya uzur

Maksud uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dirampok orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka dalam hal seperti ini pihak penyewa dapat memintakan pembatalan perjanjian swa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak yang menyewakan⁶¹

6. Pengembalian Sewaan

Jika Ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada

⁶¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op., Cit*, hlm. 183-185.

pemilikinya, dan jika barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu peralatan alat pesta, maka ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya sesuai dengan apa yang ia sewa.

Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa ketika Ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti titipan.⁶²

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa menyewa adalah sebagai berikut :

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.
- b. Apabila objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah.
- c. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud alat pesta, maka pihak penyewa wajib menyerahkan peralatan alat pesta kepada pihak pemilik dalam keadaan seperti semula ia saat menyewa.

⁶² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 173.

Dapat ditambahkan bahwa menurut Mazhab Hambali : “manakala Ijarah (sewa menyewa) telah berakhir, penyewa harus mengikat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah terimaknya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimaknya”.

Pendapat Mazhab Hambali diatas dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa, maka dengan sendirinya sewa menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa menyewa, dan dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik.⁶³

7. Udzur Yang Dapat Merusak Akad Ijarah

Menurut Hanafiyah, akad Ijarah bisa rusak denga adanya udzur. Apabila ada udzur namun akad tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak. Ibnu Abidin mengatakan bahwa setiap ada udzur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya objek akad, atau tetap dilanjutkan tapi membahayakan, maka akad menjadi brusak tidak mengikat.⁶⁴ Sementara Jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah adalah akad yang mengikat sebagaimana jual bel, akadnya tidak rusak karena udzur dari pihak yang berakad atau karena adanya cacat pada objek akad.

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun dari sewa menyewa ada 4 yaitu : pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, objek/benda yang

⁶³Chairuman Pasaribu Suhrawati K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 59-60.

⁶⁴ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), hlm. 383

disewakan, dan akad disampaikan dengan kalimat yang jelas agar transaksi sewa menyewa sah menurut pandangan Hukum Islam, maka harus terpenuhinya rukun dari sewa menyewa. Berikut merupakan pandangan hukum Islam mengenai sewa menyewa peralatan alat pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

1. Dua orang yang berakad (*muajjir dan mustajir*)

- a. Terpenuhinya rukun sewa dalam hal berakal dan *mumayyiz*

Yang melakukan akad sewa menyewa ini adalah ibu Dwi Wijayanti (selaku pemilik persewaan alat pesta) serta Bapak Santoso, ibu Siti Fatimah, dan bapak Suyatno, (selaku penyewa peralatan alat pesta). Mereka semua sudah baligh dan cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

- b. *An-Taradin* artinya kedua belah pihak melakukan atas dasar kemauan sendiri.

Pihak penyewa dan pihak yang disewakan mengadakan perjanjian sewa menyewa ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas kerelaan serta kehendak sendiri. Maka unsur *An-Taradin* telah terpenuhi.

1. Barang yang disewakan

- a. Objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya.

Objek yang disewakan dalam hal ini adalah peralatan alat pesta. Walaupun alat pesta masuk kedalam unsur tidak bergerak, namun manfaat dan persewaan dari dari alat pesta tersebut dapat diserahkan.

b. Manfaat dari objek disewakan harus sesuatu yang dibolehkan agama.

Manfaat dari transaksi sewa menyewa alat pesta ini yaitu untuk mencari penghasilan dalam bentuk persewaan alat pesta. Hal ini merupakan niaga yang dibolehkan agama.

c. Manfaat dari objek yang disewakan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.

Semua pihak telah mengetahui bahwa peralatan alat pesta menjadi objek yang akan disewakan, dan hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, baik dari pihak penyewa maupun dari pihak pemberi sewa.

d. Manfaat dari objek yang disewakan dapat dipenuhi secara hakiki.

Manfaat dari peralatan alat pesta sudah jelas dapat disewakan untuk orang yang membutuhkan.

e. Jelas ukuran dan batas waktu sewa agar terhindar dari perselisihan.

Dalam perjanjian awal, telah disebutkan berapa lama sewa tersebut, juga telah disepakati kapan barang sewa dikembalikan.

2. Imbalan sewa

Imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya. Sangat jelas bahwa imbalan atau bayaran dalam sewa menyewa ini berupa uang, yang berarti dibolehkan dalam hukum Islam. Imbalan dibayarkan secara kontan.

3. *Sighat al-aqad* ialah ijab dan Kabul

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah

adanya ijab. Dalam hal ini, pihak penyewa peralatan alat pesta dan pihak yang menyewakan peralatan pesta berijab kabul secara langsung, karena tempat tinggal yang masih dalam jangkauan satu desa. Didalam ijab Kabul ini, mereka bersepakat tentang hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban baik bagi penyewa serta pihak yang menyewakan, sekaligus menentukan besarnya harga sewa dan jangka waktu sewa.

Dalam prosesnya, menurut penulis terkait Rukun dan Syarat Sewa menyewa (*Ijarah*) sudah memenuhi ketentuan hukum Islam.

Selanjutnya, yaitu Rukun dan Syarat dilihat dalam buku Kompilasi Hukum Islam, Rukun atau Unsur jual beli (*ba'i*) terdiri dari :

1. Pihak pihak. Pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Adalah hal ini, pihak-pihak yang bertransaksi yaitu pihak penyewa peralatan alat pesta (dalam hal ini pembeli) dengan pihak yang menyewakan peralatan alat pesta (dalam hal ini penjual).

2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Dalam hal ini, objek yang menjadi transaksi jual beli yaitu peralatan alat pesta berupa benda yang tidak bergerak.

3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Kesepakatan/Ijab Qabul dilakukan dengan lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Tujuan dari adanya kesepakatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pihak penyewa peralatan alat pesta (pembeli), dan untuk memanfaatkan barang sewa bagi pemilik persewaan alat pesta (penjual).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain :

- 1) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada
- 2) Dengan kehendak sendiri
- 3) Keduanya tidak mubazir
- 4) Baligh sudah dewasa

b. Syarat objek yang diperjual belikan:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada
- 2) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada
- 3) Barang yang diperjual belikan harus berupabarang memiliki nilai
- 4) Barang yang diperjual belikan harus halal
- 5) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan jika barang itu ada ditempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang diketahui langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

9) Barang yang dijual harus ditentukan dengan pasti pada saat akad. Semua syarat objek yang pada transaksi jual beli telah terpenuhi. Dari pihak penyewa (dalam hal ini pembeli). Dan juga pihak pemberi sewa (dalam hal ini penjual) telah mengetahui mengenai objek yang akan diperjual belikan, baik dari segi objek yang tersedia dan dapat diketahui, harga dari objek, maupun batasan dari syarat khusus untuk mengambil material objek jual beli tersebut. Sehingga terhindar dari unsure ketidak jelasamn (*gharar*) dalam praktik jual beli.

c. Syarat ijab qabul (kesepakatan)

ijab qabul yaitu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Diantaranya syarat-syarat ijab qabul yaitu :

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan) si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul
- 4) *Ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- 5) *Ijab* dan *qabul* dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Semua syarat dalam Ijab dan Qabul (kesepakatan) terpenuhi oleh kedua belah pihak.

C. Konsep Umum Tentang Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Dalam hukum Islam ganti rugi berkaitan dengan *ta'widh* dan daman yang secara umum merupakan pemberian untuk mengaganti atau menutup kerugian yang benar-benar merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oportunity loss*). Kata daman diartikan sebagai ganti rugi seperti didefinisikan dalam Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah sebagai "Penyerahan suatu harta pada orang lain, apabila harta tersebut harta al-mithli (serupa dapat diukur atau dapat dihitung dengan tepat), maka harus diserahkan harta al-mithli pula, akan tetapi harta tersebut harta qiayami (harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta qiami tersebut.⁶⁵

Para ulama kontemporer berbeda-beda dalam mendefinisikan *ta'widh*. Menurut Wabbah Al-Zuhaily *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'widh* yang dimaksud untuk menutupi kerugian yang dialami dapat berupa benda atau berupa uang tunai.⁶⁶

Menurut Subekti dalam *Hukum Perjanjian*, sebagaimana dikutip dalam bukunya Bagya Agung Prabowo, *ta'widh* menurut hukum positif ada tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos

⁶⁵ Lajnah Mukawwanah Min 'iddah Ulama wa Fuquha fi al-Khilafah Uthmaniyah, *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, dalam Maktabah Syamilah*, hlm. 80

⁶⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012, Cet-I, hlm. 69.

yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudah di bayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jual beli barang jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.⁶⁷

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa objek ganti rugi (*ta'widh*) ada pada perjanjian, ganti rugi (*ta'widh*) ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu yang bertujuan untuk mengganti dan menutupi kerugian.

1. Dasar Hukum Ganti Rugi

1. QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”⁶⁸

2. QS. Al-Baqarah ayat 279-280

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ

كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

⁶⁷ Ibid, hlm. 69

⁶⁸ Tim Syamil Al-Qur'an, Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata, (Bandung: Sygma Publishing), 2010, Cet-I, hlm.106.

Artinya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui)”.⁶⁹

3. Hadist Nabi

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya :

Dalam hadist ini menjelaskan kepada kita bahwa, kalau misalnya ada orang yang mempunyai hutang kepada kita, tagihlah dia dengan sopan jangan sampai dia merasa sangat bersalah dan bisa memecahkan persaudaraan kita.

4. Kaidah Fiqih

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam kaidah ini dijelaskan segala sesuatu itu semuanya sebenarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam kaidah ini adanya ganti rugi itu diperbolehkan selama yang dituntut dalam kerugiannya masih dalam koridor riil atas beban-beban kreditur dalam menangani masalah ini.

2. Syarat Sah Ganti Rugi

Syarat sahnya *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian yang dimaksud yaitu biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak seharusnya dikeluarkan. Jumlah atau besarnya

⁶⁹ Ibid, hlm. 47

ta'widh sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-adhai'ah*)⁷⁰

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ketentuan *ta'widh* secara umum terbatas pada menutupi kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqih hal tersebut tidak dapat diganti (diminta *ta'widh*). Objek *ta'widh* adalah harta yang ada dan konkrit serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya).⁷¹

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Ganti Rugi

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili

Ta'widh (ganti rugi adalah) menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.⁷² Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa :

1. Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding.

⁷⁰ Bagya Agung Prabowo, *Op Cit*; hlm. 70.

⁷¹ Ibid, hlm. 72

⁷² Wahbah Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Daar al fikr, 1998), hlm. 87.

2. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sejenis atau dengan uang.⁷³

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqih hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya).

b. Pendapat Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'i

Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.⁷⁴

c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi :

Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariat dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan penundaan hak sama dengan ghashab karena itu seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di

⁷³ Ibid., hlm. 93

⁷⁴ Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'i, *Mafaahim Asasiyyah fil al-Bunuuaku al-Islamiyah*, (al Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996), hlm. 115

ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.⁷⁵

4. Fatwa DSN MUI No: 43 /DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi :

Berdasarkan fatwa ketentuan ta'widh terbagi menjadi dua antara lain:

1. Ketentuan umum

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas
- c. kerugian riil sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan
- d. besar ganti rugi *ta'widh* adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dalam (*fixed cost*) diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*)
- e. ganti rugi *ta'widh* hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna, serta murabahah dan ijarah.

⁷⁵ Ibid., hlm. 117

2. Ketentuan Khusus

- a. jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak
- b. besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.⁷⁶

Jadi dalam menentukan ganti rugi harus seimbang sesuai dengan kerugian yang di derita.



⁷⁶ Fatwa DSN-MUI NO: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*).

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Pofil Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti

1. Latar Belakang Dwi Wijayanti

Dwi Wijayanti adalah salah satu orang yang bergerak di bidang penyewaan peralatan pesta, berdiri pada bulan Agustus tahun 2002 yang bertempat di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Usaha pelayanan jasa penyewaan peralatan pesta menawarkan berbagai macam produk seperti rias pengantin, tenda, panggung, kursi, sound system, dan peralatan pesta lainnya.

Mengapa saya memutuskan untuk menekuni bidang usaha jasa penyewaan alat pesta ini karena kehidupan masyarakat yang tidak akan pernah lekang oleh waktu karena dari lahir manusia selalu diadakan pesta untuk merayakan sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, melalui asumsi bahwa bahwa usaha ini akan selalu dibutuhkan selagi masih adanya manusia memiliki budaya dan agama maka saya merasa yakin bahwa usaha yang kami rintis ini kan selalu memiliki pelanggan karena manusi tidak pernah berenti berpesta baik itu pesta pernikahan, konser musik ulang tahun, dan even lainnya yang akan selalu membutuhkan peralatan untuk menghelat pesta-pesta atau event tersebut.

Maksud dan tujuan mendirikan usaha peralatan pesta ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kami, khususnya di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Pada awalnya usaha jasa penyewa peralatan pesta masih sedikit pelanggan dan hal itu kami tidak merisaukannya, semakin berjalannya waktu usaha persewaan alat pesta semakin banyak penyewa. Saat ini peminat terhadap penyewaan alat pesta semakin meningkat terlihat pada musim acara-acara khitanan, nikahan, perpisahan sekolah, dan lain-lain. Konsumen biasanya mencari informasi tentang penyewaan jasa peralatan pesta dan mendatangi langsung untuk mengisi formulir penyewa serta melakukan pembayaran kepada si pemilik alat pesta yaitu Dwi Wijayanti.

Persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti merupakan usaha keluarga yang pengelolaanyapun dilakukan dengan anggota keluarganya sendiri. Dari pihak Mbak Dwi Wijayanti sendiri sebagai pemilik sekaligus penerima job order atau pesanan bila ada yang menyewa, seperti halnya pesanan berupa rias pengantin maka akan ia laksanakan atau ia tangani sendiri, beliau terjun langsung ke lokasi. Akan tetapi jika bentuk pesanan sewa tenda atau tarop akan diberikan kepada suaminya dalam pelaksanaanya juga akan dibantu oleh beberapa orang pekerja atau karyawan.

Dalam hal ini pemilik persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti berinisiatif untuk mendirikan persewaan alat-alat pesta agar bisa membantu atau menolong kepada masyarakat apabila ada orang yang mempunyai acara atau keperluan besar seperti hajatan dan semoga bisa bermanfaat bagi si penyewa ataupun yang menyewakannya.⁷⁷

⁷⁷ Ibu Dwi Wijayanti, *Wawancara*, Kalianda, 11 November, 2017

2. Visi , Misi dan Tujuan Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti

Visi :

- a. Menjadi jasa persewaan alat-alat pesta yang Terpercaya, Jujur, dan Amanah.
- b. Dan menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik.

Misi

- a. Menjadi jasa persewaan alat-alat pesta profesional dan terpercaya.
- b. Menyediakan perlengkapan alat-alat pesta yang berkualitas baik.
- c. Menjalinkan kerjasama dengan rekan keluarga, penyewa, dan pekerja.

Tujuan :

- a. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam melakukan kegiatan usaha.
- b. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam usaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Membudayakan semangat, sikap perilaku dan kemampuan dalam berusaha dikalangan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berusaha.

3. Faktor-Faktor Yang Memperkuat Membuka Usaha Peralatan Pesta Dwi Wijayanti

- a. Usaha ini tidak pernah sepi dari order karena akan selalu ada orang yang berpesta dan membutuhkan peralatan pesta.

- b. Saya memperhatikan jarang menemukan jasa sewa peralatan yang memiliki paket-paket penyewaan yang hemat sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat menengah kebawah tanpa harus memberatkan mereka dengan harga yang mahal.
- c. Saya merasa tertarik untuk mengkombinasikan usaha ini dengan bidang-bidang usaha yang lain seperti event organizer, jasa penyewaan pakaian pengantin, dan jasa editing video bagi pelanggan yang mengadakan pesta.

Dengan pertimbangan faktor-faktor diatas, maka saya menyatakan InsyaAllah yakin bahwa usaha ini dapat bersaing dengan usaha-usaha serupa meskipun membutuhkan dana yang cukup besar sebagai modal awalnya. Namun perlu diingat dibutuhkan komitmen yang tinggi dan disertai dengan ketekunan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita akan selalu mendapat ridho dari-Nya dalam melaksanakan usaha ini.

4. Perkiraan Biaya Usaha

Biasanya yang dibutuhkan dalam sebuah pesta atau hajatan diantaranya yaitu: meja, kursi, tenda, sound system, kamera, dekorasi panggung, dll. Peralatan inilah yang wajib dimiliki jika ingin menggeluti usaha ini. Memang biaya investasinya cukup besar apabila peralatan yang disediakan lengkap tetapi bagi kita yang mungkin memiliki dana terbatas tidak perlu berkecil hati karena banyak pesta kelas kampung yang sederhana dan kebutuhannya tidak semewah pesta dikota-kota besar.

Untuk itu paling tidak kita harus memiliki tenda terpal, kursi, meja kayu dan sound system sederhana yang mungkin dapat dibuat sendiri. Untuk kelas

sederhana ini paling tidak dana yang dibutuhkan minimal Rp.20 jutaan. Untuk sewa alat ini biasanya memiliki operator yang cukup banyak. Oleh karena itu jumlah karyawan yang dipekerjakan tidak cukup apabila hanya satu-dua orang saja. Untuk menyiasati agar biaya karyawan ini tidak terlalu mahal, bisa diambil karyawan dengan system kontrak hanya pada saat ada order. Jangan pula melupakan brosur dan kartu nama yang menyebutkan apa saja pesta atau event yang dapat kita tawarkan sebab usaha ini memiliki pengaruh informasi dari mulut kemulut yang ikut berperan.

Dalam mengangkut property tentunya kita membutuhkan kendaraan, namun apabila dana terbatas pada masa wal mungkin kita dapat menyewa kendaraan orang lain. Yang paling penting dari usaha ini adalah kita harus benar-benar mengetahui barang-barang apa saja yang kita miliki sebab tak jarang barang yang kurang dikontrol saat pengembaliannya mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Usahakan juga untuk selalu rutin merawat properti kita karena semakin bersih dan terawat barang yang kita sewakan maka pelangganpun akan merasa nyaman. Biasanya konsumen yang puas dengan masalah sewa menyewa ini akan jarang berpindah ke orang lain karena jika sudah merasa cocok akan sulit untuk berpaling.

5. Manfaat Usaha Peralatan Pesta Dwi Wijayanti

a. Manfaat Ekonomi

Usaha peralatan pesta Dwi Wijayanti ini memiliki keuntungan yang cukup menjanjikan. Dengan menyewakan berbagai alat pesta yang terjangkau dan berbeda dengan usaha sewa menyewa peralatan pesta

lainnya. Dengan kata lain, menyewakan dengan harga terjangkau akan tetapi kualitas tetap baik.

b. Manfaat Sosial

1. Bagi Pemilik

Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini berkembang menjadi penyewaan peralatan pesta yang besar dan juga memiliki cabang-cabang diseluruh kota di Indonesia. Dan juga dapat memberikan sebuah pertanggung jawaban social dengan memberikan acara-acara positif seperti menjadi pengusung acara pernikahan dan acara lainnya.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya usaha sewa menyewa peralatan alat pesta ini bagi masyarakat dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, karena apabila usaha ini berkembang maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu kelancaran daam usaha ini.

6. Produk yang ditawarkan

Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam, diantaranya yaitu :

- a. Rias pengantin
- b. Tenda dan dekorasi
- c. Macam-macam kursi
- d. Macam-macam meja
- e. Pelaminan
- f. Peralatan prasmanan

g. Panggung dan sound system

Dengan memiliki berbagai berbagai macam peralatan pesta maka masyarakat dapat memilih produk yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

7. Strategi Pemasaran

Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah :

a. Dari mulut ke mulut

Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup bercerita dengan teman-teman kita keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk menyewa usaha peralatan pesta kami.

b. Dengan media internet

Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti facebook, karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha peralatan alat pesta ini.

B. Praktik Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti

Pelaksanaan akad sewa menyewa dalam persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti melalui telfon atau bertemu langsung dengan pemilik. Akad disini merupakan ungkapan kesepakatan

atau transaksi tentang hal yang menyangkut dari pesanan barang dan pelaksanaan sewa-menyewa antara pihak penyewa dan pemilik persewaan yang bertujuan untuk membuat kesepakatan secara tertulis antara keduanya. Akad terjadi ketika penyewa memesan barang apa saja yang akan disewa dan memberitahukan hari serta tanggal barang sewaan digunakan, kemudian pihak persewaan menulis pesanan barang sewa pada bon pesanan dan memberitahukan jumlah harga atas barang yang disewa. Setelah terjadi kesepakatan dan bon pesanan diberikan kepada penyewa, ternyata dalam bon pesanan terdapat klausul tentang pembatalan sewa. Dimana klausul tersebut tidak dicantumkan dalam brosur yang dimiliki oleh persewaan. Sehingga pihak penyewa tidak mengetahui tentang klausul pembatalan sewa tersebut sebelumnya dan baru diketahui pada saat berlangsungnya akad. Pihak persewaanpun tidak menjelaskan mulai kapan berlakunya dan bagaimana yang dimaksud dalam klausul pembatalan sewa tersebut, sehingga belum ada kejelasan terhadap aturan tentang pembatalan sewa.⁷⁸

Aturan sewa menyewa tercantum dalam brosur dan bon pesanan yang dimiliki oleh persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti. Dalam brosur memuat tentang jenis barang sewa berupa kursi yang terdiri dari tiga macam kursi yang disewakan yaitu, kursi plastik dengan harga satuan tujuh ratus rupiah (Rp. 700, 00), kursi lipat dengan harga satuan dua ribu rupiah (Rp. 2000,00), serta kursi betawi (sofa) dengan harga satuan tujuh ribu rupiah (Rp. 7000,00). Semua barang yang disewakan oleh persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti tercantum dalam brosur

⁷⁸ Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti, *Brosur dan Bon Pesanan*.

lengkap dengan harga sewanya. Selain barang sewa dan harga sewa barang dalam brosur dicantumkan pula biaya-biaya lain selain dari biaya sewa barang, seperti biaya survey lokasi, biaya lembur untuk pegawai, biaya angkat kursi atau meja naik turun lantai, biaya masuk gang sempit mempersulit kerja pegawai mengangkut atau memasang barang sewa dan lain sebagainya. Tidak hanya itu aturan tersebut diantaranya yaitu, harga sewa berlaku hanya untuk sekali pakai atau 24 jam, biaya sewa kurang dari empat ratus ribu rupiah (Rp. 400.000,00) dikenakan ongkos kirim.⁷⁹

Dalam bon pesanan persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti ini memuat tentang jumlah barang yang disewa oleh penyewa, nama barang yang disewa oleh penyewa, harga satuan dari barang sewa yang disewa oleh penyewa, serta jumlah harga dari barang sewa harus dibayar oleh penyewa. Tanggal kirim barang, tanggal pakai barang sewa serta tanggal pengambilan barang sewa telah tercantum dalam bon pesanan tersebut, tetapi dalam brosur tidak dicantumkan. Adapun ketentuan pesanan persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti antara lain :

- a. Periksa barang-barang sebelum diterima, barang yang rusak, pecah hilang, menjadi tanggung jawab penyewa
- b. Setiap pembatalan pemesanan barang-barang sewa dibebani biaya sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan
- c. Jika barang telah dikirim lalu dibatalkan, maka di bebani biaya 75% dari nilai sewa yang dibatalkan.⁸⁰

⁷⁹ Brosur Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wiyanti.

⁸⁰ Brosur dan Dokumen Tentang Ketentuan Pesanan Perserwaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti

C. Praktik Pembatalan Sepihak dan Pengambilan biaya kerugian

Praktik pembatalan sepihak dan pembatalan biaya kerugian dijelaskan dalam kasus berikut sebagaimana hasil dari wawancara dengan pemilik persewaan alat-alat pesta Dwi Wijanyanti :⁸¹

1. Kasus yang pertama yaitu, seorang penyewa bernama Pak Suyatno bermaksud menyewa kursi sebanyak 200 kursi untuk acara pernikahan putrinya. Perjanjian sewa telah disepakati dan pesanan sewa telah ditulis dalam bon pesanan. Perjanjian sewa telah berjalan selama empat hari. Namun sebelum hari dimana pernikahan putrinya dilaksanakan, Pak Suyatno membatalkan pesanan sewanya berupa kursi yang sebelumnya berjumlah 200 kursi menjadi 100 kursi. Dan karena pembatalan tersebut pihak persewaan membebankan biaya kerugian 50% dari nilai sewa yang dibatalkan oleh Pak Suyatno. Pembebanan biaya tersebut dirasa perlu oleh pihak persewaan mengingat selama masa perjanjian telah disepakati pihak persewaan tidak dapat menerima pesanan sewa dari orang lain.
2. Kasus yang kedua dari Ibu Siti Fatimah yang memesan barang sewa berupa tenda 4x6 sebanyak 2 tenda untuk acara dari tempatnya bekerja. Pemesanan dilakukan Ibu Siti Fatimah pada pagi hari. Pihak persewaan dengan segera mencatat pesanan dalam bon pesanan setelah kesepakatan terjalin antara keduanya. Namun pada sore harinya Ibu Siti

⁸¹ Ibu Dwi Wijayanti, *Wawancara*, Kalianda, 11 November 2017, pukul 17.00 WIB.

Fatimah menelfon pihak pemilik persewaan dan mengatakan akan membatalkan pesanan tenda yang telah dipesan pada pagi hari. Pembatalan tersebut dilakukan karena acara yang akan diselenggarakan oleh Ibu Siti Fatimah tidak mendapatkan izin tempat dan dipindahkan acaranya digedung. Akibat pembatalan tersebut pihak persewaan membebankan biaya pembatalan kepada Ibu Siti Fatimah karena setiap pembatalan pemesanan barang-barang sewa dibebani biaya sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan.

3. Kasus yang ketiga tentang pembatalan penyewaan panggung yang dilakukan oleh Bapak Santosa. Bapak Santosa memesan panggung sudah jauh-jauh hari sebelum acara yang akan diadakan beliau berlangsung. Pada pagi hari sebelum acara berlangsung, pihak persewaan telah mengirim panggung yang dipesan oleh Bapak Santosa. Setelah sampai dikediaman Bapak Santosa, tetangga rumah Bapak Santosa ada yang meninggal dunia. Bapak Santosa membatalkan pemesanan panggung yang sudah dikirim tersebut karena jika tetap dipasang panggungnya akan menutup jalan, maka dari itu dibatalkan untuk menyewa panggung tetapi menggantinya dengan memesan tenda untuk disumbangkan kepada tetangganya yang meninggal tersebut. Pembatalan tersebut tetap dikenakan biaya ganti rugi oleh pihak persewaan meskipun Bapak Santosa telah menggantinya atau menukar pesanan panggung dengan tenda. Karena dalam aturan yang ditetapkan persewaan jika barang telah dikirim

kemudian dibatalkan, maka dibebani biaya 75% dari nilai sewa yang dibatalkan.

Berdasarkan contoh kasus-kasus di atas telah diketahui bahwa setiap pembatalan pemesanan barang-barang sewa yang dilakukan penyewa selalu dikenakan biaya sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan dan jika barang telah dikirim kemudian dibatalakan, maka biaya yang dikenakan pada penyewa 75% dari nilai sewa yang dibatalkan.

Pembayaran ganti rugi yang dikenakan kepada penyewa atas pembatalan pemesanan barang-barang sewa dapat dilakukan pembayaran dengan cara langsung datang kerumah pemilik persewaan alat-alat Pesta Dwi Wijayanti atau langsung dibayarkan pada penagihan yang dilakuka saat pengiriman barang-barang sewa.

BAB IV

ANALIS DATA

Pada bab ini akan di analisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Dimana data tersebut penulis dapatkan dari metode interview sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan yang objektif yang dapat berfungsi sebagai fakta. Disamping itu juga penulis menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data yang telah penulis dapatkan melalui metode dokumentasi.

Sebelum dianalisis data yang penulis peroleh terlebih dahulu dikumpulkan sesuai dengan jenis data yang ada, sesuai data terkumpul menurut jenisnya masing-masing kemudian penulis menganalisis data dengan metode untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada, setelah data dianalisis kemudian diambil kesimpulan.

Dengan demikian dapat dihindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan yang akan dijadikan fakta untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat-alat Pesta (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan).

A. Analisis Praktik Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan tentang pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat pesta Dwi Wijayanti di Desa Agom Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan dapat dianalisis sebagai berikut :

Dalam urusan Muamalah perlu memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia yaitu sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam dan merupakan salah satu asas hukum Islam, hal ini demi kemaslahatan umat manusia, memberikan manfaat dan meminimalisir kemudharatan bagi manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar tindakannya tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain. Dengan demikian manusia dapat mengambil manfaat antara satu dengan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma Agama tanpa kecurangan dan kebatilan.

Salah satu bentuk mu'amalah yang sering terjadi yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan pemberian suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perijinan yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, jika terjadi pembatalan pada pesanan barang sewa maka akan dikenakan beban biaya kerugian atas pembatalan pesanan barang sewa yang hanya tercantum dalam bon pesanan saja. Pihak persewaan tidak mencantumkan aturan-aturan tentang pembatalan sewa dalam brosur yang dimilikinya, sehingga pihak penyewa tidak mengetahui tentang adanya pengambilan biaya kerugian jika terjadi pembatalan barang-barang yang disewa tersebut sebelumnya dan baru diketahui pada saat berlangsungnya akad.

Ketidak jelasan pada aturan-aturan yang dibuat oleh pihak persewaan tidak sampai disitu, pihak persewaanpun tidak memberikan kejelasan waktu kapan aturan pengambilan biaya kerugian yang dikarenakan pembatalan barang sewa dibuat meskipun perjanjian sewa itu sebelum lewtdari sehari atau setelah berlangsung perjanjian tersebut dalam beberap hari.

Sebagaimana dalam kasus pembatalan barang sewa yang terjadi di persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti pada bab III dijelaskan sebagai berikut :

2. Kasus pak Suyatno yang apad mulanya memesan barang sewa berupa 200 kursi dan mengurangi pemesanan tersebut terjadi ketika perjanjian sewa telah berjalan selama empat hari. Pembebana biaya atas pembatalan sewa tersebut sebesar 50% dari jumlah nilai sewa.
3. Kasus pada Ibu Siti Fatimah yan memesan barang sewa pada pagi hari laludibatalkan keseluruhan barang sewanya pada sore harinya. Beban biaya yang dikeluarkan pada Ibu Siti Fatimah juga sebesar 50% dari jumlah nilai sewa.
4. Kasus atas pembatalan sewa yang dilakukan oleh Bapak Santoso yang membatalkan pesanan barang sewa berupa panggung. Pembatalan dilakukan oleh Bapak Santoso setelah barang sewa dikirim. Tetapi Bapak Santoso menggantinya dengan memesan tenda. Dar pembatalan tersebut persewaan membebankan biaya sebesar 75% dari nilai sewa yang dibatalkan.

Menurut pelaksanannya sewa-menyewa pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti, dalam pelaksanaan sewa-menyewa pada dasarnya adalah mubah,

karena akad perjanjian sewa-menyewa yang dialukan kedua belah pihak telah menunjukkan kerelaan dan adanya kesepakatan. Akan tetapi menurut hukum Islam adalah haram dikarenakan ketidak sesuaian dari unsur akad yang mencantumkan pengambilan biaya atas pembatalan sepihak yang dilakukan penyewa. Hal tersebut dapat diketahui pada pembebanan biaya atas pembatalan sewa pada yang pertama dan kedua, dari segi waktu pembatalan dan jenis pembatalan yang berbeda namun pengambilan biaya kerugian yang dibebankan sama yaitu sebesar 50%. Serta pada kasus ketiga ini pihak pihak persewaan ini memandang pembatalan tersebut sebagai pembatalan atas barang yang telah dikirim, pihak persewan tidak memperhatikan bahwa dari pembatalan tersebut juga disertakan penggantian pesanan. Namun beban biaya yang dikenakan kepada penyewa jika barang telah dikirim kemudian dibatalkan yaitu sebesar 75% dari barang sewa yang dibatalkan.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat-alat Pesta Dwi Wijayanti

Dalam hukum Islam sewa menyewa disebut dengan *Ijarah*, yang menurut bahasa yaitu imbalan (ganti) dan dapat pula berarti balasan, sedangkan menurut istilah suatu akad kemanfaatan dengan adanya suatu imbalan atau penggantian.

Sewa menyewa dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan "*Al-Ijarah*", berasal dari kata "*Al-Ajru*", menurut bahasa ialah "*Al-Iwadh*". Dalam bahasa Indonesia diartikan ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah, sewa (*al-ijarah*) adalah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.

Kelompok Hanafiyah mengartikan *Ijarah* dengan akad yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

Jumhur Ulama Fikih berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.

Pengertian sewa, berbeda dengan jual beli. Dalam Islam, secara bahasa *al-ba'i* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira* (membeli). Demikian *al-ba'i* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.

Adapun secara *etimologis*, *ba'i* berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *ba'i* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (mu'awadhah) materi (maliyah) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ('ain) atau jasa (manfaah) secara permanen (mu'abad).

Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya jika dianalisis menurut hukum Islam dari ketentuan yang menyangkut tentang aturan sewa yang telah ditetapkan oleh persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayant. Mengenai aturan pengambilan biaya kerugian atas pembatalan barang sewa yang hanya dicantumkan pada bon pesanan. Hal ini yang membuat pihak penyewa tidak dapat mengetahui sebelum memesan barang sewa apabila terjadi pembatalan barang sewa akan dikenakan beban biaya. Sehingga apabila sudah diketahui sebelumnya

maka pihak penyewa juga bisa berhati-hati memesan dalam memesan barang yang akan disewanya, agar dikemudian hari tidak sampai terjadi pembatalan terhadap barang-barang sewa yang telah dipesan. Untuk itu seharusnya dalam brosur juga dicantumkan tentang aturan apabila terjadi pembatalan pemesanan barang-barang sewa akan dikenakan biaya ganti rugi.

Dalam menentukan pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sewa yang dilakukan oleh pihak penyewa. Selama ini pihak penyewa membebankan biaya sebesar 50% dari nilai sewa terhadap setiap pembatalan pemesanan barang-barang sewa yang belum dikirim dan membebankan biaya 75% dari nilai sewa yang dibatalkan, jika barang telah dikirim kemudian dibatalkan. Ketentuan pengambilan biaya kerugian yang terjadi pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti ini ada yang tidak sesuai menurut hukum Islam. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَنْ أَعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia dengan seimbang dengan kerugian yang telah ia tampilkan kepadamu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa dalam menentukan ganti rugi harus seimbang sesuai dengan kerugian yang diderita.

Dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi terdapat ketentuan umum dan ketentuan khusus, sebagai berikut :

Ketentuan Umum :

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi *ta'widh* adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha- 'i ah*).

Ketentuan Khusus :

- a. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- b. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Yang dimaksud sebagai objek ganti rugi adalah benda atau harta yang jelas dan nyata ada yang dapat dimintakan ganti rugi. Besar ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian riil sebagaimana dimaksud atas biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan. Sedangkan kerugian berupa immateriil tidak dapat dimintakan ganti rugi. Pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti kerugian yang dimintakan

biaya ganti rugi berupa biaya immateriil yang tergambar pada kasus-kasus yang terjadi. Kerugian yang timbul akibat pembatalan yang dilakukan oleh Bapak Suyatno misalnya, pihak persewaan membebankan biaya sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan. Karena persewaan menganggap perjanjian sewa yang telah disepakati selama empat hari sebelumnya dengan barang sewa berupa kursi sebanyak 200 kursi, maka pihak persewaan tidak dapat menerima pesanan sewa dari orang lain jika tanggal atau hari yang dipesan sama dengan hari atau tanggal dimana Bapak Suyatno juga memesan barang sewa tersebut. Namun ternyata terjadi pembatalan dari Bapak Suyatno maka pihak persewaan pun merasa dirugikan karena keuntungan yang belum diterima tersebut termasuk dalam kerugian immateriil karena merupakan keuntungan masa yang akan datang, tidak nampak dan nyata wujudnya pada saat pembatalan terjadi.

Sedangkan dengan kasus Bapak Santoso atas pembatalan barang sewa setelah dikirim dikenakan beban biaya 75% dari nilai sewa yang dibatalkan, maka dalam menentukan besar ganti rugi tersebut harus sesuai dengan nilai kerugian riil yang dialami sebagaimana biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengiriman barang sewa serta ongkos atau upah pekerja yang ikut dalam pelaksanaan pengiriman barang sewa tersebut. Akan tetapi, besar ganti rugi tidak diperbolehkan dicantumkan dalam akad sewa-menyewa.

Sebagaimana dalam ketentuan khusus yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi *ta'widh* tidak membolehkan besarnya ganti rugi ini dicantumkan dalam akad. Maka aturan dalam bon pesanan persewaan alat-alat pesta Dwi Wiyanti yang mencantumkan besarnya beban biaya ganti rugi atas

pembatalan barang-barang sewa ini di larang menurut Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi *ta'widh*. Dikarenakan bon pesanan tersebut digunakan sebagai bukti kesepakatan dalam akad sewa-menyewa pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti.

Berdasarkan uraian di atas, praktik pengambilan biaya kerugian yang dibebankan oleh pembatalan pemesanan barang-barang sewa sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan ini adalah haram menurut Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi *ta'widh* sedangkan atas pembatalan barang sewa setelah dikirim dikenakan beban biaya 75% dari nilai sewa yang dibatalkan. Namun dalam hal menentukan ganti rugi tersebut sudah sesuai dengan kerugian riil yang nyata telah diderita oleh persewaa maka besar ganti rugi tersebut Adalah mubah dengan Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (*ta'widh*).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik pengambilan biaya kerugian pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti terjadi jika penyewa melakukan pembatalan pesanan barang sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Besar biaya kerugian yang harus dibayarkan penyewa kepada pemilik barang sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan, jika pembatalan sebelum barang sewa telah dikirim kepada penyewa. Namun jika barang sewa telah dikirim kepada penyewa maka pihak penyewa diharuskan membayar biaya kerugian sebesar 75% dari nilai sewa yang dibatalkan. Hal tersebut hanya tertulis dalam aturan yang terdapat pada bon pesanan persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti.
2. Praktik pengambilan biaya kerugian yang telah dianalisis secara Hukum Islam, dalam pelaksanaan sewa menyewa pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena akad perjanjian sewa menyewa yang dilakukan kedua belah pihak telah menunjukkan kerelaan dan adanya kesepakatan. Akan tetapi ketidaksesuaian dari unsur akad yang mencantumkan pengambilan biaya atas pembatalan sepihak yang dilakukan penyewa. Sebagaimana dalam ketentuan khusus yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi ta'widh tidak membolehkan besarnya ganti rugi ini dicantumkan dalam akad. Maka aturan dalam bon pesanan persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti yang mencantumkan besarnya beban biaya ganti rugi atas

pembatalan barang-barang sewa ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi ta'widh. Dikarenakan bon pesanan tersebut digunakan sebagai bukti kesepakatan dalam akad sew menyewa pada persewaan alat-alat pesta Dwi Wijayanti.

B. SARAN-SARAN

1. Diharapkan kepada pemilik persewaan untuk menjelaskan aturan-aturan sewa dan mencantumkan aturan yang ada pada bon pesanan kedalam brosur persewaan, agar penyewa mengetahui maksud dari aturan sewa yang telah ditetapkan oleh persewaan alat pesta.
2. Sebaiknya persewaan alat pesta dalam menentukan biaya ganti rugi atas pembatalan pesanan barang sewa tersebut disesuaikan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).
- Azhar Basyir, Ahmad, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perjanjian Islam Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Gazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan Shidiq, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ja'far, A. Khumedi Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: 2014).
- Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012
- Chairuman Pasaribu Suhrawati K. Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996).
- Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Miza Bunaya Kreativa, 2011).
- Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahnya, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta'wid)
- Gemala Dewi, dkk, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, II, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik), V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Helmi Karin, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Al- alamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyi, Terjemah Fiqih Empat Madzab, (Bandung: Hasyim Perss, 2010).
- Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi II, (Balai Pustaka 1991).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia , 2011).

Lajnah Mukawwanah Min 'iddah Ulama wa Fuquha fi al-Khilafah Uthmaniyah, Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, dalam Maktabah Syamilah.

M.Iqbal Hasan, Metode Penelitian dan Aplikasinya,(Bogor:GhaliaIndonesia, 2002).

Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2005).

Moh Saifullah Al-Aziz, Fiqih Islam Lengkap, (Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahan), (Surabaya Terbit Terang).

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: RakeSaraswati,1996.

Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sugiyono, Metode Penelitian 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajae, 2001).

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif,(Bandung: Alfa Beta,2008).

SuharsiniArikunto, ProsedurPenelitian: SuatuPendekatanPraktek, hlm. 102.

Sutrisno Hadi, Metode Research,2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1998).

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Gajah Mada University,1975).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

Urutan dan Penjelasan asas-asas perjanjian ini diambil dari berbagai sumber.
Lihat Abdul Ghofir Anshori, Gemala Dewi dkk, Fathurrahman Djamil, dan Dewi Nurul Musjtari.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1980).

Tim Syamil Al-Qur'an, Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata, (Bandung:

Sygma Publising), 2010.

Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Wahbah Zuhaily, Nazariyah al-Dhaman, (Damsyiq: Daar al fikr, 1998).

Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam), (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Wahbah Zuhaily, Nazariyah al-Dhaman, (Damsyiq: Daar al fikr, 1998).

.

